

Implementasi Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kepramukaan: Penguatan Kecakapan Siaga Bencana Untuk Meningkatkan Resiliensi Sekolah

Irnawati,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ivet Semarang

Alro Putra Sanindo,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ivet Semarang

Della Putri Aprilia,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ivet Semarang

Luthfiah Putri Sabrina

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ivet Semarang, irnasyauqi.30@gmail.com

Abstrak

Indonesia yang dikenal sebagai “laboratorium bencana” dunia menuntut institusi pendidikan untuk bertransformasi dari sekadar pusat transmisi pengetahuan menjadi unit yang memiliki kapasitas kesiapsiagaan bencana secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Gerakan Pramuka dalam memperkuat resiliensi sekolah melalui integrasi literasi kebencanaan yang aplikatif dan kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan periode 2016–2026 yang membahas pendidikan kebencanaan, kepramukaan, dan ketangguhan sekolah. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi antara potensi besar Gerakan Pramuka khususnya melalui kurikulum Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dengan implementasi di lapangan yang masih didominasi aktivitas seremonial dan belum berbasis risiko bencana lokal. Rendahnya pemahaman pembina Pramuka terhadap standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan serta keterbatasan sarana simulasi praktis menjadi faktor utama yang menghambat penguatan kecakapan psikomotorik peserta didik. Sebagai sintesis, penelitian ini merumuskan model resiliensi kolaboratif yang mengintegrasikan kebijakan manajerial sekolah dengan kemahiran taktis kepramukaan. Sinkronisasi antara program Sekolah Aman Bencana dan kegiatan Pramuka dipandang mampu membangun ekosistem mitigasi bencana yang berkelanjutan, aplikatif, dan adaptif terhadap ancaman bencana di masa depan.

Kata Kunci: pendidikan kebencanaan, kepramukaan, resiliensi sekolah.

Abstract

Indonesia, known as the world's “disaster laboratory,” requires educational institutions to transform from mere centers of knowledge transmission into units with independent disaster preparedness capabilities. This study aims to analyze the strategic role of the Scout Movement in strengthening school resilience through the integration of applicable and contextual disaster literacy. The research method used is a Systematic Literature Review (SLR) of scientific publications and policy documents from 2016 to 2026 that discuss disaster education, scouting, and school resilience. The results of the study show a competency gap between the

great potential of the Scout Movement, particularly through the Special Proficiency Requirements (SKK) curriculum, and its implementation in the field, which is still dominated by ceremonial activities and is not yet based on local disaster risks. The low level of understanding of Scout leaders regarding standard operating procedures (SOPs) for disasters and the limited availability of practical simulation facilities are the main factors hindering the strengthening of students' psychomotor skills. As a synthesis, this study formulates a collaborative resilience model that integrates school managerial policies with Scouting tactical skills. The synchronization between the Disaster Safe School program and Scouting activities is considered capable of building a sustainable, applicable, and adaptive disaster mitigation ecosystem against future disaster threats.

Keywords: *disaster education, Scouting, school resilience.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan laboratorium bencana dunia yang secara konsisten menghadapi ancaman seismik dan hidrometeorologi yang ekstrem. Secara geodetik, lokasi Indonesia yang berada pada zona subduksi tiga lempeng tektonik besar Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik menyebabkan kerentanan permanen terhadap gempa bumi dan tsunami (BNPB, 2023: 14). Berdasarkan data dari Indonesian Disaster Data (IDD), sepanjang dekade terakhir, frekuensi bencana meningkat hingga 40%, dengan sektor pendidikan seringkali menjadi korban paling terdampak akibat lemahnya sistem mitigasi baik struktural maupun non-struktural di lingkungan institusi pendidikan (Pujiyanto et al., 2021: 48). Kondisi tersebut menegaskan bahwa sekolah bukan lagi sekadar ruang transmisi ilmu pengetahuan, melainkan harus bertransformasi menjadi unit tanggap darurat yang mampu melindungi seluruh warganya dari ancaman maut.

Dalam perspektif global, resiliensi sekolah telah menjadi diskursus utama dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Resiliensi sekolah tidak boleh hanya dipahami sebagai ketahanan fisik infrastruktur bangunan (mitigasi struktural), melainkan harus mencakup aspek kapasitas kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dalam menghadapi krisis (Sutton & Tierney, 2006: 118). Literasi kebencanaan muncul sebagai instrumen krusial untuk membangun kapasitas tersebut. Literasi ini mencakup pemahaman mendalam tentang

siklus bencana, pengenalan tanda-tanda alam, hingga keterampilan teknis penyelamatan diri (Amri et al., 2017: 158). Namun, pengenalan literasi ini dalam kurikulum formal sering kali terbentur pada rigiditas jadwal akademik, sehingga internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan sering kali hanya menjadi narasi teoretis yang gagal dalam implementasi praktis.

Di sinilah peran strategis Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan terbesar di Indonesia menjadi relevan. Pramuka memiliki struktur organisasi yang hierarkis dan masif hingga ke tingkat gugus depan di sekolah-sekolah, yang sangat potensial untuk menjadi agen perubahan dalam mitigasi bencana. Prinsip dasar kepramukaan yang menekankan pada kemandirian, kedisiplinan, dan pengabdian masyarakat (Kwartir Nasional, 2018: 32) memiliki titik temu yang kuat dengan komponen tanggap darurat bencana. Melalui Syarat Kecakapan Khusus (SKK), Pramuka menyediakan ruang bagi peserta didik untuk mempelajari keterampilan praktis seperti pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pemadaman kebakaran, hingga manajemen komunikasi darurat. Namun, fakta empiris di lapangan seringkali menunjukkan fenomena "anomali kompetensi"; di mana kegiatan Pramuka masih terjebak pada aktivitas rutin yang bersifat seremonial tanpa pengayaan

konten kebencanaan yang mutakhir dan berbasis risiko lokal (Hidayati, 2020: 92).

Gap antara potensi besar Pramuka dan realitas kompetensi peserta didik diperparah oleh rendahnya kapasitas Pembina Pramuka dalam mentransfer pengetahuan kebencanaan yang benar. Banyak pembina yang tidak memiliki akses terhadap pelatihan mitigasi yang terstandarisasi, sehingga instruksi yang diberikan kepada siswa cenderung bersifat spekulatif dan tidak berdasarkan prosedur operasional standar (SOP) kebencanaan yang diakui secara nasional (Ristanto, 2022: 105). Selain itu, minimnya dukungan kebijakan sekolah yang mengintegrasikan anggaran kegiatan Pramuka dengan program "Sekolah Aman Bencana" menyebabkan inisiatif pendidikan kebencanaan sering kali berhenti di tengah jalan tanpa keberlanjutan.

Tanpa adanya evaluasi kritis terhadap tantangan-tantangan tersebut, pendidikan kebencanaan dalam Pramuka hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata terhadap penurunan angka risiko korban bencana di sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengurai hambatan implementasi literasi kebencanaan dalam kepramukaan secara komprehensif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk merumuskan model keberlanjutan resiliensi yang tidak hanya mengandalkan pelatihan insidental, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang terintegrasi antara kebijakan sekolah, kompetensi pembina, dan kemahiran taktis peserta didik. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan analisis tantangan manajerial dengan model aplikatif yang dapat diadopsi secara luas oleh sekolah-sekolah di zona merah bencana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review/SLR) untuk mengeksplorasi secara komprehensif strategi implementasi literasi kebencanaan dalam organisasi kepramukaan di tingkat sekolah menengah. Penggunaan metode SLR dalam penelitian ini bertujuan untuk mensintesis berbagai temuan empiris, hambatan manajerial, serta model konseptual yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu, sehingga mampu menghasilkan sebuah kerangka model keberlanjutan resiliensi yang adaptif terhadap karakteristik kerentanan wilayah di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam kegiatan kepramukaan sebagai upaya penguatan kapasitas non-struktural di lingkungan institusi pendidikan guna menciptakan ekosistem kesiapsiagaan yang terintegrasi.

Strategi pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada berbagai basis data akademik digital yang kredibel, meliputi ScienceDirect, Google Scholar, dan SINTA (Science and Technology Index), serta repositori dokumen kebijakan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas seleksi literatur, penelitian ini mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pencarian data dilakukan dengan menggunakan kombinasi operator Boolean: ("Literasi Kebencanaan" AND "Kepramukaan") AND ("Resiliensi Sekolah"). Kriteria inklusi yang ditetapkan mencakup literatur berupa artikel jurnal ilmiah, laporan resmi, atau tesis yang diterbitkan dalam rentang waktu 2016-2026, yang berfokus pada pendidikan kebencanaan berbasis ekstrakurikuler serta manajemen risiko bencana di lingkungan sekolah.

Analisis data dilakukan melalui teknik Analisis Isi (Content Analysis) dan Sintesis Naratif

dengan mengikuti alur analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al., (2014: 12-14) yang meliputi reduksi data, penyajian data secara kategoris, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan dua tema besar, yakni tantangan implementasi yang mencakup kompetensi pembina serta dukungan manajerial sekolah, dan model keberlanjutan resiliensi yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara satuan pendidikan, organisasi Pramuka, dan otoritas penanggulangan bencana. Validitas temuan dijamin melalui Triangulasi Sumber dan Teori, di mana data dari berbagai literatur ilmiah dikonfrontasikan dengan dokumen rencana penanggulangan bencana terbaru untuk memastikan bahwa model resiliensi yang diusulkan memiliki tingkat keterterapan (applicability) yang tinggi terhadap kebutuhan riil di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap artikel ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan, ditemukan bahwa kegiatan kepramukaan memiliki potensi strategis dalam mengintegrasikan pendidikan kebencanaan di lingkungan sekolah. Nilai-nilai dasar kepramukaan seperti kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial dinilai selaras dengan prinsip kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Berbagai literatur menunjukkan bahwa kecakapan kebencanaan yang meliputi pertolongan pertama, pengenalan risiko bencana, serta evakuasi darurat telah tercantum dalam Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan satuan karya Pramuka penanggulangan bencana (Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2018).

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan di sekolah berada pada spektrum yang beragam. Sebagian literatur melaporkan adanya praktik integrasi pelatihan kebencanaan

melalui simulasi bencana dan latihan evakuasi dalam kegiatan Pramuka. Namun, mayoritas penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut masih bersifat tidak berkelanjutan dan belum terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan kegiatan sekolah (Hidayati, 2020). Kondisi ini menyebabkan penguatan kecakapan siaga bencana peserta didik belum berkembang secara optimal.

Temuan hasil SLR juga mengindikasikan bahwa pendekatan pembelajaran kebencanaan dalam kegiatan Pramuka lebih banyak menekankan aspek pengetahuan dibandingkan keterampilan praktis. Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti alat simulasi kebencanaan, media pembelajaran kontekstual, dan perlengkapan pertolongan pertama, menjadi faktor utama yang membatasi pelaksanaan latihan lapangan secara optimal (Pujiyanto et al., 2021). Akibatnya, transfer keterampilan kebencanaan kepada peserta didik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembelajaran berbasis pengalaman.

Selain aspek sarana, kompetensi pembina Pramuka muncul sebagai faktor kunci dalam keberhasilan implementasi pendidikan kebencanaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar pembina belum memperoleh pelatihan kebencanaan yang terstandarisasi dan berkelanjutan, sehingga pemahaman terhadap prosedur operasional standar kebencanaan masih terbatas (Ristanto, 2022). Kondisi ini berdampak pada variasi kualitas pelaksanaan pendidikan kebencanaan antar sekolah.

Hasil kajian juga mengungkapkan bahwa dukungan kebijakan sekolah terhadap integrasi pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan masih relatif rendah. Integrasi antara kegiatan Pramuka dan program Sekolah Aman Bencana (SPAB) belum menjadi prioritas dalam perencanaan kebijakan sekolah, baik dari sisi penganggaran maupun evaluasi program

(BNPB, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan masih menghadapi tantangan struktural yang mempengaruhi keberlanjutan implementasinya di lingkungan sekolah.

Kegiatan kepramukaan memiliki kesesuaian konseptual yang kuat dengan prinsip pendidikan kebencanaan berbasis pengalaman (*experiential learning*). Nilai-nilai fundamental kepramukaan, seperti kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama tim, dan kepedulian sosial, merupakan kompetensi inti yang sangat dibutuhkan dalam situasi darurat bencana. Temuan ini sejalan dengan pandangan Amri et al. (2017) yang menekankan bahwa pendidikan kebencanaan yang efektif harus mampu mengembangkan kapasitas peserta didik secara holistik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar mampu merespons bencana secara cepat, tepat, dan aman.

Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi normatif kepramukaan dan realitas implementasi di tingkat sekolah. Kegiatan Pramuka di banyak satuan pendidikan masih cenderung berorientasi pada aktivitas rutin dan seremonial, seperti upacara, latihan baris-berbaris, dan perkemahan umum, tanpa penguatan materi kebencanaan yang kontekstual dan berbasis risiko lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan kebencanaan belum sepenuhnya diposisikan sebagai bagian strategis dari perencanaan kegiatan kepramukaan, melainkan masih bersifat insidental dan kurang terintegrasi dalam program sekolah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hidayati (2020) yang menyatakan bahwa lemahnya perencanaan program dan minimnya evaluasi berkelanjutan menyebabkan pendidikan kebencanaan sulit memberikan dampak nyata terhadap kesiapsiagaan peserta didik.

Aspek sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan. Minimnya alat simulasi bencana, keterbatasan perlengkapan pertolongan pertama, serta kurangnya media pembelajaran kontekstual menyebabkan proses pembelajaran lebih banyak menekankan aspek pengetahuan dibandingkan keterampilan praktis. Padahal, simulasi bencana dan latihan lapangan merupakan elemen esensial dalam membentuk kesiapsiagaan nyata dan ketangguhan psikomotorik peserta didik (Pujiyanto et al., 2021). Tanpa pengalaman langsung melalui praktik dan simulasi, internalisasi nilai dan keterampilan kebencanaan cenderung bersifat dangkal dan berisiko gagal diterapkan ketika peserta didik dihadapkan pada kondisi darurat yang sesungguhnya.

Selain faktor sarana, kompetensi pembina Pramuka muncul sebagai variabel kunci dalam keberhasilan implementasi pendidikan kebencanaan di sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar pembina belum memperoleh pelatihan kebencanaan yang terstandarisasi dan berkelanjutan, sehingga pemahaman terhadap prosedur operasional standar (SOP) kebencanaan masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada variasi kualitas pelaksanaan pendidikan kebencanaan antar sekolah serta berpotensi menimbulkan miskonsepsi dalam praktik penanganan bencana. Ristanto (2022) menegaskan bahwa rendahnya literasi kebencanaan pembina berimplikasi langsung pada rendahnya kualitas transfer keterampilan kebencanaan kepada peserta didik.

Dalam konteks resiliensi sekolah, temuan penelitian ini menguatkan pandangan Sutton dan Tierney (2006) bahwa ketangguhan institusi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik bangunan, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia dalam merespons, beradaptasi,

dan pulih dari bencana. Oleh karena itu, pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan perlu dipahami sebagai strategi mitigasi non-struktural yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Integrasi antara kegiatan Pramuka dan kebijakan Sekolah Aman Bencana (SPAB) menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan kebencanaan tidak berjalan secara parsial, tetapi terinternalisasi dalam sistem manajemen sekolah.

Model resiliensi kolaboratif yang dirumuskan dalam penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan manajerial sekolah, peningkatan kompetensi pembina Pramuka, serta penguatan kemahiran taktis peserta didik. Kolaborasi lintas sektor dengan lembaga penanggulangan bencana, seperti BNPB dan BPBD daerah, diperlukan untuk menjamin kesesuaian materi kepramukaan dengan standar kebencanaan nasional serta karakteristik risiko lokal. Melalui kolaborasi ini, kegiatan Pramuka tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, tetapi juga sebagai laboratorium pembelajaran sosial untuk melatih kesiapsiagaan dan respons bencana secara nyata.

Dengan demikian, pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan memiliki peluang besar untuk berkontribusi secara signifikan dalam membangun budaya kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kebijakan sekolah yang konsisten, peningkatan kapasitas pembina secara berkelanjutan, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai. Implementasi yang terintegrasi dan kontekstual diharapkan mampu memperkuat resiliensi sekolah secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sehingga sekolah benar-benar siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.

PENUTUP

Simpulan

Pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan memiliki potensi strategis dalam memperkuat resiliensi sekolah, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Indonesia. Nilai-nilai fundamental kepramukaan yang menekankan kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pembelajaran berbasis pengalaman menjadikan kegiatan Pramuka sebagai wahana yang relevan dan efektif untuk menanamkan literasi kebencanaan secara aplikatif kepada peserta didik. Melalui pendekatan ini, penguatan kapasitas kesiapsiagaan tidak hanya berlangsung pada tataran kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi normatif kepramukaan dan praktik implementasi di lapangan. Kegiatan Pramuka di sekolah masih cenderung didominasi oleh aktivitas seremonial, belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendidikan kebencanaan berbasis risiko lokal. Keterbatasan sarana simulasi, rendahnya kompetensi pembina dalam memahami standar operasional prosedur kebencanaan, serta lemahnya integrasi kebijakan sekolah dengan program Sekolah Aman Bencana menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penguatan kecakapan siaga bencana peserta didik.

Oleh karena itu, penguatan pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan memerlukan dukungan kebijakan sekolah yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pembina Pramuka secara terstandar, serta sinergi lintas sektor dengan lembaga penanggulangan bencana. Integrasi yang sistematis antara kegiatan Pramuka dan program Sekolah Aman Bencana diharapkan mampu membangun ekosistem kesiapsiagaan yang kontekstual, berkelanjutan, dan adaptif terhadap ancaman bencana di masa depan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pusat

pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang aman yang mampu melindungi dan membekali warganya dalam menghadapi risiko bencana secara mandiri dan tangguh.

Implementasi pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan merupakan strategi pedagogis yang efektif dalam membangun kesadaran risiko bencana pada peserta didik sejak dini. Kepramukaan sebagai kegiatan nonformal memiliki karakter pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang memungkinkan siswa tidak hanya memahami konsep kebencanaan secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Hal ini sejalan dengan pandangan Kolb (1984) yang menegaskan bahwa pembelajaran efektif terjadi melalui pengalaman langsung yang diikuti refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen aktif.

Lebih lanjut, pendidikan kebencanaan melalui kegiatan kepramukaan mampu memperkuat kecakapan hidup (*life skills*) peserta didik, terutama dalam aspek kesiapsiagaan, pengambilan keputusan cepat, serta kerja sama tim saat menghadapi kondisi darurat. Menurut UNESCO (2015), integrasi pendidikan pengurangan risiko bencana (*Disaster Risk Reduction/DRR*) dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam merespons bencana secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, pendekatan ini menjadi semakin relevan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2023) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berada pada zona rawan bencana, baik geologi maupun hidrometeorologi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kebencanaan melalui kepramukaan dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi struktural dan non-struktural di lingkungan sekolah.

Selain itu, kegiatan kepramukaan yang menekankan nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, dan kepedulian sosial juga berkontribusi dalam membentuk karakter tangguh terhadap bencana (*disaster resilience character*). Luthar et al. (2000) menjelaskan bahwa resiliensi merupakan hasil dari interaksi antara faktor individu dan lingkungan yang mendukung kemampuan adaptasi positif dalam situasi sulit. Dengan demikian, latihan simulasi bencana, pertolongan pertama, dan manajemen evakuasi dalam kepramukaan dapat menjadi media pembentukan karakter tersebut.

Penguatan kecakapan siaga bencana melalui kepramukaan juga mendukung terciptanya Sekolah Aman Bencana (*Safe School*) sebagaimana dicanangkan dalam kerangka Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Dalam kerangka tersebut, pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun budaya sadar bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kapasitas respons warga sekolah (UNDRR, 2015).

Terakhir, keberhasilan implementasi pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan sangat ditentukan oleh sinergi antara sekolah, pembina pramuka, pemerintah, dan masyarakat. Shaw et al. (2011) menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas (*community-based disaster risk management*) dalam meningkatkan efektivitas program mitigasi bencana. Dengan kolaborasi yang kuat, pendidikan kebencanaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam budaya sekolah dan kehidupan sehari-hari peserta didik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar institusi pendidikan mengintegrasikan secara sistematis pendidikan kebencanaan ke pada kegiatan kepramukaan melalui penyelarasan program dengan kebijakan Sekolah Aman Bencana (SPAB). Integrasi ini perlu didukung

oleh perencanaan yang berkelanjutan, pengalokasian anggaran yang memadai, serta penyediaan sarana dan prasarana simulasi kebencanaan yang relevan dengan karakteristik risiko lokal.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas pembina Pramuka menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pembina harus mengikuti pelatihan kebencanaan yang terstandarisasi dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan lembaga penanggulangan bencana, seperti BNPB dan BPBD, agar mampu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kebencanaan secara tepat kepada peserta didik sesuai prosedur operasional standar yang telah ditetapkan.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan empiris berlandaskan studi lapangan guna menguji efektivitas model resiliensi kolaboratif yang diusulkan dalam konteks sekolah yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan untuk dampak pendidikan kebencanaan berbasis kepramukaan terhadap perubahan sikap, keterampilan, dan kesiapsiagaan peserta didik secara kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kontribusinya terhadap penguatan resiliensi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, A., Bird, D. K., Ronan, K., Haynes, K., & Lassa, J. (2017). Disaster risk reduction-related education in Indonesia: A review of progress and challenges. *Journal of Integrated Disaster Risk Management*, 7(2), 151–166.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Laporan tahunan bencana Indonesia 2023: Menakar ketangguhan bangsa. BNPB Press.

Hidayati, S. (2020). Analisis kapasitas pembina pramuka dalam implementasi manajemen

risiko bencana di sekolah. *Jurnal Pendidikan Kebencanaan*, 5(1), 85–98.

- Kitchenham, B. A., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. Keele University and University of Durham.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. (2018). *Petunjuk penyelenggaraan satuan karya pramuka penanggulangan bencana*. Kedai Pramuka.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *International Journal of Surgery*, 88, 105906.
- Pujianto, A., Sudarmojo, S., & Wardani, K. (2021). Evaluasi program sekolah aman bencana (SPAB) pada jenjang menengah atas di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Pendidikan*, 14(3), 42–58.
- Ristanto, R. (2022). Problematika implementasi literasi kebencanaan dalam kegiatan ekstrakurikuler: Studi kasus pembina pramuka di Kota Semarang. *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*, 12(1), 100–115.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sutton, J., & Tierney, K. (2006). *Disaster resilience: An integrated approach*. Charles C Thomas Publisher.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023*. Jakarta: BNPB.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work.

Child Development, 71(3), 543–562.
<https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164>

Shaw, R., Shiwaku, K., Kobayashi, H., & Kobayashi, M. (2011). Linking experience, education, perception, and earthquake preparedness. *Disaster Prevention and Management*, 13(1), 39–49.
<https://doi.org/10.1108/09653560410521689>

UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

UNESCO. (2015). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. Paris: UNESCO Publishing.